

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Delvian Yosuky¹, Felix Santono², Felycia³, Tio Sania⁴

E-mail : 2141175.delvian@uib.edu¹, 2141345.felix@uib.edu², 2141250.felycia@uib.edu³,
2141235.sania@uib.edu⁴

Universitas International Batam

Alamat: Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29426

Korespondensi penulis: 2141175.delvian@uib.edu

Abstract

The events of the covid-19 pandemic produce an uncertain future. This has a very far-reaching influence on capitalization of capitalization and also social problems such as increasing levels of violence and crime rates. The purpose of this study is to analyze government policies regarding reactions due to inflation, especially in Indonesia. Inflation rate has a negative effect on the reaction load. The inflation rate affects the response because when the stimulus increases, inflation will decrease and vice versa. There are several government policies in overcoming pressure due to inflation, namely creating jobs, changing the investment climate, spreading several economic stimulus, and improving the quality of human resources through education.

Keywords: *Government policy, unemployment, inflation, Indonesia*

Abstrak

Peristiwa pandemi covid-19 mengakibatkan hal yang tidak pasti di masa depan. Hal ini memberi suatu pengaruh yang sangat jauh terhadap pengurangan kapitalisasi dan juga permasalahan sosial misalnya angka pengangguran dan tingkat kriminal yang semakin banyak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisa kebijakan pemerintah mengenai pengangguran akibat adanya inflasi khususnya di Indonesia. Laju Inflasi mempunyai efek negatif terhadap penduduk pengangguran. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pengangguran karena pada saat pengangguran meningkat, maka inflasi akan rendah dan sebaliknya. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari inflasi yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, pengangguran, inflasi, Indonesia

Pendahuluan

Peristiwa pandemi covid-19 mengakibatkan masa depan yang tak pasti. Hal ini memberi suatu pengaruh yang sangat jauh terhadap pengurangan kapitalisasi dan juga permasalahan sosial misalnya angka pengangguran dan tingkat kriminal yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja menjadi sulit bagi masing-masing negara untuk memutuskan suatu kebijakan dalam melewati krisis kesehatan dan kebijakan perbaikan ekonomi dalam waktu yang bersamaan (Maharani & Maherni, 2022). Pandemi COVID-19 sangat berakibat pada aktivitas bermasyarakat. Aktivitas sehari-hari menjadi susah, khususnya bagi masyarakat yang menetap di wilayah yang mendapat kendala sosial. Seluruh sektor menderita kerugian ekonomi dan non-ekonomi. Iklim ekonomi yang tidak menentu sejak pandemi membuat sebagian besar perusahaan hanya bertahan dalam kurun waktu yang singkat. Untuk menekan biaya, beberapa pengusaha mengurangi tenaga kerja mereka. Banyak penduduk kehilangan pekerjaan karena pembatasan kegiatan sosial, isolasi diri, dan larangan untuk bepergian (Abidin, 2021).

Pengangguran adalah suatu permasalahan di berbagai negara. Sebagai contoh, negara maju seperti AS, Inggris, Jepang, dan Jerman mempunyai masalah pengangguran. Hal ini cukup berbeda dengan negara berkembang yang jumlah penganggurannya masih sangat tinggi. Secara universal, pengangguran itu buruk bagi negara sehingga perlu mengurangi atau menghindarinya. Pengangguran juga menunjukkan bahwasannya tingkat penerapan negara belum mencapai puncaknya. Pengangguran juga mempunyai akibat tersendiri, seperti ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya karena kurangnya pendapatan. Dengan cara ini, masalah baru timbul ketika tindakan kriminal dan pencurian terjadi. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh kegagalan dalam pembangunan. Pengangguran jangka panjang bisa menyebabkan krisis sosial dan masalah sosial (Permana, 2018).

Krisis ekonomi secara universal saat ini mirip dengan kasus krisis yang terjadi tahun 1998 dan 2008, hanya saja berbeda penyebabnya, dan cara menanganinya. Setiap Negara menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan dalam memilih instrumen kebijakan untuk menghadapi masalah ekonomi. Pada krisis ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan masyarakat, karena krisis kesehatan (banyak korban meninggal karena virus) secara tidak langsung membebani anggaran nasional, yang menyebabkan penutupan kegiatan sosial ekonomi. Jika keadaan ini terus berlanjut, tentu akan mempengaruhi perputaran ekonomi domestik, dan otomatis perekonomian dunia akan kacau balau. Peran pemerintah dalam menyongsong pembentukan dan kemajuan ekonomi, khususnya di negara berkembang, dilakukan dengan kebijakan moneter dan fiskal (Maharani & Maherni, 2022).

Laju inflasi yang dialami suatu negara ialah parameter untuk mengukur baik buruknya suatu masalah perekonomian negara tersebut, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang benar untuk melindungi dan meninjau tingkat inflasi tersebut. Sebagai contoh, laju inflasi Jawa Timur mencapai 9,66% pada tahun 2008. Dari perspektif teori cost-push, laju inflasi yang meningkat pada tahun 2008 adalah suatu akibat dari keputusan pemerintah dalam meningkatkan harga bahan bakar, sehingga menjadikan biaya lebih tinggi, yang juga berdampak pada upah dan harga (Wiguna, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi di Indonesia”.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sumarsono (2009:6) dan Sukirno (2003:328) dalam Yacoub dan Firdayanti (2019), pengangguran adalah persentase pengangguran terhadap banyaknya jumlah lapangan kerja. Orang yang sedang mencari suatu pekerjaan namun tidak mempunyai pekerjaan disebut pengangguran. Selain pengangguran yang nyata, ada juga pengangguran karena biaya yang meningkat, perubahan kebiasaan konsumsi atau kemajuan suatu teknologi. Pengangguran adalah bagian dari tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja menurut Subri (2003:57) dalam Yacoub dan Firdayanti (2019) adalah masyarakat dengan usia kerja yaitu usia 15-64 tahun, merupakan orang yang mau bekerja dan bisa menghasilkan barang dan jasa apabila ada permintaan untuk tenaga kerjanya. Tenaga kerja terbagi atas angkatan kerja atau bukanlah angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari bukan hanya pencari kerja saja tetapi juga orang yang sudah bekerja dan pengangguran. Sementara yang bukan angkatan kerja termasuk kelompok yang sekolah, kelompok ibu rumah tangga, dan kelompok pendapatan lainnya. Tiga kelompok yang bukan angkatan kerja tersebut bisa mengusulkan jasanya untuk bekerja (Yacoub dan Firdayanti, 2019).

Menurut Sukirno (2010) dalam Kasim dkk (2021) pengangguran biasanya diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya ialah sebagai berikut:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Hal itu bukan disebabkan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, namun karena sedang mencari pekerjaan lainnya yang lebih bagus.
2. Pengangguran siklis, yaitu pengangguran di luar pengangguran alami. Pada dasarnya, pengangguran ini terbentuk karena penurunan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka atau gulung tikar.
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat transformasi struktur aktivitas ekonomi.
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tergantikannya tenaga kerja manusia dengan mesin dan bahan kimia.

Inflasi ialah masalah ekonomi yang menerima banyak perhatian berdasarkan para pemikir ekonomi. Inflasi adalah kesamaan tarif harga general untuk naik secara berkelanjutan dari waktu ke waktu (kecenderungan berkelanjutan untuk tingkat harga umum naik dari waktu ke waktu). Menurut definisi ini, kenaikan sementara harga umum bukanlah inflasi, tetapi peningkatan harga barang dan jasa secara berkelanjutan selama periode tertentu dapat diartikan sebagai inflasi. pengertian lain dari inflasi ialah tren harga yang naik secara berkelanjutan, umumnya dalam kurun waktu yang lama. Peningkatan satu atau dua komoditas bukanlah inflasi kecuali jika peningkatan itu juga menyebar ke peningkatan harga komoditas lain (Rangkuti, 2021).

Inflasi adalah salah satu parameter terpenting dalam perekonomian karena bisa memiliki efek yang sangat besar bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Bagi perekonomian, meningkatnya inflasi bisa saja menciptakan kelemahan dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pengangguran. Di sisi kemakmuran, peningkatan inflasi mengakibatkan rendahnya pendapatan riil (daya beli) masyarakat, yang berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatnya kemiskinan, terutama bagi pekerja dengan pendapatan tetap (Rangkuti, 2021).

Inflasi timbul dari tekanan sisi permintaan, inflasi sisi permintaan (*demandpull inflation*) dan inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*). Inflasi dorongan biaya disebabkan oleh penurunan output karena penambahan biaya produksi, yang didorong oleh in-efisiensi perusahaan, penurunan nilai tukar di negara-negara, kenaikan harga barang-barang manufaktur, dan penambahan gaji dari serikat pekerja yang tangguh, dan lain-lain. Sementara inflasi sisi permintaan disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat (AD) yang sangat banyak daripada penawaran suatu produksi agregat (Rangkuti, 2021).

Inflasi memiliki dampak negatif pada tingkat pengangguran. Menurut Phillips, inflasi berhubungan negatif dengan pengangguran. Philips (1958) dalam Mankiw (2003:436) dalam Yacoub dan Firdayanti (2019) menemukan bahwasannya rotasi hubungan antara pengangguran dan inflasi berlandaskan pada asumsi bahwasannya inflasi mencerminkan tingginya permintaan agregat. Menurut teori permintaan, ketika permintaan agregat meningkat, harga meningkat ketika permintaan meningkat. Ketika harga inflasi tinggi, produsen meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja ialah satu-satunya pemasukan yang bisa menambah produksi). Tingkat pengangguran menurun sebagai efek dari tingginya permintaan tenaga kerja dan peningkatan harga atau inflasi (Yacoub dan Firdayanti, 2019).

Laju inflasi menerangkan stabilitas dalam harga yg menerangkan, seberapa akbar taraf keberhasilan suatu perekonomian dalam sektor ekonomi makro pada suatu negara. Ketika suatu negara mempunyai nilai inflasi yg tinggi, maka impak yg disebabkan merupakan negatif dalam perekonomian, lantaran hal tadi akan sangat mengganggu mobilisasi dana domestika serta investasi. Inflasi dibagi menjadi empat kategori, yaitu

- Inflasi ringan < 10%
- Inflasi sedang 10% - 30%
- Inflasi berat 30% - 100%
- Hiperinflasi > 100%

(Permana, 2018)

Pada ujungnya, pengangguran dan kemiskinan akan memberikan pengaruh perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Hal itu terbukti mengingat perkembangan ekonomi ialah salah satu parameter terpenting untuk menilai performa suatu perekonomian. menurut negara atau wilayah. Dikatakan bahwa perekonomian tumbuh ketika produksi barang dan jasa terjadi peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan ekonomi mengukur seberapa besar pendapatan tambahan atau kesejahteraan masyarakat dapat dihasilkan melalui kegiatan ekonomi selama kurun waktu tertentu. perkembangan ekonomi di negara atau wilayah yang terus membaik menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut sedang baik-baik saja (Novriansyah, 2018).

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pertanyaan deskriptif yang menggambarkan gejala faktual. Hal ini relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Oleh karena itu, metode pendekatan kualitatif sangat cocok untuk analisis penelitian ini. Pengumpulan data penelitian didasarkan pada literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan. Referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini

didasarkan pada data yang dapat dipercaya, akurat dan tervalidasi, antara lain: B. Jurnal ilmiah atau situs resmi pemerintah yang mempublikasikan informasi penunjang penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran

Para ekonom telah berusaha untuk membentuk suatu hubungan antara pengangguran dan inflasi. Kedua variabel tersebut berhubungan dalam ekonomi. Hubungan yang terdapat di antara keduanya adalah hubungan timbal balik. Pada saat pengangguran meningkat, maka inflasi akan rendah begitupun sebaliknya. Hubungan antara pengangguran dan juga inflasi mulai memikat perhatian para ekonom pada akhir 1950-an. Sebuah studi oleh AW Phillips tentang hubungan antara pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran untuk pekerja kerah biru di Inggris 1957-1986. Survei menemukan korelasi negatif antara pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran (Yacoub dan Firdayanti, 2019).

Temuan A. W. Philips ditingkatkan lebih lanjut di Amerika Serikat dengan sedikit modifikasi oleh Paul Samuelson dan Robert Solow. Penelitian Paul Samuelson dan Robert Solow menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara pertumbuhan pengangguran dan pertumbuhan inflasi (*unemployment rate*). Kurva Phillips menunjukkan bahwasannya keseimbangan harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak dapat berjalan secara berbarengan karena diperlukan kompromi. Menggapai suatu peluang kerja yang tinggi artinya bersedia menangani beban inflasi yang tinggi. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara pengangguran dan inflasi. Semakin banyak tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat inflasi. Tingkat pengangguran yang rendah selalu dijaga dengan menyongsong peningkatan tingkat inflasi, dan sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran selalu dibiarkan untuk mengurangi tingkat inflasi. Dengan kata lain, kurva Phillips menyimpulkan bahwa adanya trade-off antara pengangguran dan inflasi (Yacoub dan Firdayanti, 2019).

b. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran

Akibat dari pengangguran ialah rendahnya taraf mutu hidup masyarakat karena kurangnya penghasilan. Hal ini mengurangi tingkat kesejahteraan dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan (Rizal dan Mukaromah, 2021). Analisis mengapa orang yang menganggur kehilangan pekerjaan harus dilakukan untuk menilai sistem mana yang salah atau perlu diperbaiki. Apakah mereka menganggur karena tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok, karena tidak ada cukup kesempatan kerja, atau karena mereka terlalu malas untuk mencari pekerjaan dan menghidupi diri sendiri. Apa pun alasan pribadi mereka, mereka semua masih kembali ke cara berpikir masing-masing. Hidup harus selalu realistis. Tidak ada gunanya jika terlalu pilih-pilih dan tidak mencobanya. Hidup terus berjalan, dengan kebutuhan yang terus bertambah. Jika tidak bekerja, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup (Latifa dan Pribadi, 2021).

Peningkatan mutu sumber daya manusia bisa dimulai dari sektor pendidikan. Siswa perlu tahu apa yang harus dilakukan setelah lulus. Sekolah dan guru juga harus membimbing siswa untuk menemukan potensi apa yang dapat mereka kembangkan. Salah satunya adalah pelaksanaan tes kompetensi diri dan kepribadian untuk mengetahui minat

dan bakat siswa. Dengan cara ini, siswa dapat mengidentifikasi lebih awal dan memutuskan bidang mana yang tepat untuk mereka (Latifa dan Pribadi, 2021).

Selain dari itu pemerintah juga harus menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman. Sistem pendidikan yang baik membuktikan tingkat kemakmuran masyarakat dan mutu sumber daya manusia. Sistem pendidikan Indonesia telah sering dikritik oleh masyarakat umum, guru, siswa dan orang tua. Sumber kritik adalah sistem pendidikan yang dianggap kompleks, kurangnya sosialisasi, dll. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi jalannya kebijakan mereka. Juga, guru dan siswa harus diamati sebagai pengguna kebijakan jika mereka ingin mengubah atau meningkatkan kebijakan. Pemerintah juga tidak boleh terlalu ideologis dalam merumuskan strategi dan sebaliknya realistis dalam menyesuaikan strategi dengan karakteristik masyarakat (Latifa dan Pribadi, 2021).

Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan beberapa langkah proaktif untuk mengatasi masalah pengangguran akibat dari inflasi di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut berpusat pada pasar tenaga kerja dan lembaga pasar tenaga kerja, dengan tujuan mengatasi permasalahan pengangguran. Di bawah ini adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengangguran khususnya akibat inflasi khususnya dari pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan, program kesempatan kerja dilaksanakan dengan mendorong sektor swasta untuk kreatif dalam penciptaan lapangan kerja, seperti melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah juga memberikan kesempatan kerja lewat proyek-proyek yang dibayarkan dari APBN melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
- b. Mengubah iklim investasi, kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas gotong royong agar investor dapat menanamkan modalnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong investor berinvestasi dan mendirikan proyek yang bisa menarik tenaga kerja dan menekan pengangguran.
- c. Menyebarkan beberapa langkah stimulus ekonomi, termasuk tambahan pajak penghasilan, pelonggaran pembayaran pinjaman dan kredit, dan kebijakan untuk memudahkan kontribusi jaminan sosial untuk pekerjaan, mengurangi kurang lebih 56 juta pekerja sektor formal

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laju Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap penduduk pengangguran. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pengangguran karena pada saat pengangguran meningkat, maka inflasi akan rendah dan sebaliknya.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari inflasi yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis ialah perlunya kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran khususnya akibat dari inflasi. Hal ini bisa dimulai dengan membentuk beberapa program sebagai bagian dari usaha dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117-138.
- Kasim, R., Engka, D. S., & Siwu, H. D. (2021). ANALISIS PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Latifa, I., & Pribadi, F. (2022). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal dalam Mengatasi Pengangguran di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), 137-146.
- Maharani, Y., & Marheni, M. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19:(STUDI KASUS INDONESIA). *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17(02), 234-244.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59-73.
- Permana, D. D. (2018). Analisis Pengangguran Di Yogyakarta.
- Rangkuti, Z. (2021). *Analisis kausalitas antara inflasi, pengangguran dan investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. In *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies* (Vol. 1, pp. 1-12).
- Wiguna, A. B. (2019). Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur: Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu?. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 214-229.
- Yacoub, Y. M. F., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 132-142.